



News Title : Mendag Dukung Kejagung	
Media Name : Rakyat Merdeka	Journalist : MEN
Publish Date : 20 April 2022	Tonality : Positive
News Page : 1-8	News Value : 169,200,000
Resources : ST Burhanuddin (Jaksa Agung RI), Muhammad Lutfi (Menteri Perdagangan), Sahat Sinaga (Ketua Umum Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI))	Ads Value : 56,400,000
Section/Rubrication : Headline News	Topic : Mafia Minyak Goreng

Dirjennya Jadi Tersangka Mafia Migor Mendag Dukung Kejagung

Teka-teki siapa mafia minyak goreng alias migor yang bikin langka dan mahalnya migor, akhirnya dibongkar Kejaksaan Agung (Kejagung). Salah satunya adalah dirjen di Kementerian Perdagangan (Kemendag). Mengetahui anak buahnya ditetapkan jadi tersangka atas dugaan mafia migor, Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi mendukung Kejagung membongkar kasus ini.

KEMARIN, Kejagung menetapkan tersangka dalam kasus pemberian fasilitas ekspor minyak sawit alias *Crude Palm Oil* (CPO). Ada 4 orang yang ditetapkan jadi tersangka dalam kasus yang dianggap sebagai mafia migor ini.

Dari pemerintah ada Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag, Indrasari

♦ BERSAMBUNG KE HAL 8

Jaksa Agung: Perbuatan IWW Merugikan Negara

Mendag Dukung Kejagung

... DARI HALAMAN 1

Wisnu Wardhana (IWW). Sementara dari pihak swasta ada Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, Master Parulian Tumanggor (MPT); Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Group, Stanley MA (SMA) dan General Manager di Bagian General Affair PT Musim MAS, Picare Togare Sitanggang (PTS).

Keempat tersangka itu, langsung dibawa ke Gedung Bundar Kejaksaan dan langsung diperiksa. Keluar dari ruang pemeriksaan, mereka sudah mengenakan rompi berwarna merah muda, ciri khas tahanan Kejagung.

Awak media langsung mengerubuti IWW dengan melontarkan beberapa pertanyaan. IWW tidak mengubrisnya, dan menggunakan jurus diam seribu bahasa, sambil menutupi wajahnya dengan map biru. Ketiga tersangka lainnya juga tidak berkomentar. Mereka langsung masuk ke mobil tahanan yang akan membawanya ke rutan Kejagung.

Dalam konferensi persnya, Jaksa Agung, ST Burhanuddin mengatakan, kasus ini berkaitan dengan penerbitan persetujuan ekspor kepada eksportir yang seharusnya tidak mendapat izin karena tidak memenuhi syarat DMO (*Domestic Market Obligation*) dan DPO (*Domestic Price Obligation*).

Menurut dia, IWW sebagai pejabat di Kemendag menerbitkan izin terkait persetujuan ekspor kepada 3 perusahaan

itu. Padahal, ketiga perusahaan tersebut tidak memenuhi syarat.

Syarat yang dimaksud adalah DMO, yakni 20 persen dari total ekspor. "Adanya permufakatan antara pemohon dan pemberi izin dalam proses penerbitan persetujuan ekspor," kata Burhanuddin.

Adapun 3 tersangka dari pihak swasta, disebutnya, rutin berkomunikasi intens dengan IWW. Padahal, para tersangka mengajukan permohonan izin persetujuan ekspor minyak goreng dengan tidak memenuhi syarat DMO.

Kata Burhanuddin, penyelidikan oleh jaksa telah dilakukan sejak 14 Maret 2022. Selama penyelidikan, jaksa telah memeriksa 14 saksi dan dokumen surat terkait pemberian fasilitas ekspor.

Lalu, penyidik mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Prin-17/F.2/Fd. 2/04/2022 tanggal 4 April 2022.

Keempat tersangka ini diduga melanggar Pasal 54 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a, b, e, dan f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 129 Tahun 2022 juncto Nomor 170 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah untuk DMO maupun DPO, dan Ketentuan Bab II Huruf A angka (1) huruf b, juncto Bab II Huruf C angka 4 huruf c Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor 02/DAGLU/PER/1/2022 tentang petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan dan pengaturan ekspor CPO, RDB Palm Olein dan UCO.

"Atas perbuatan tersebut, diindikasikan dapat menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara," tukas Jaksa Agung.

Bagaimana tanggapan Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi? Dengan tegas, Lutfi mengatakan, tidak akan melindungi anak buahnya yang tersangkut kasus hukum. Ia mendukung proses hukum yang dilakukan Kejagung untuk membongkar dugaan gratifikasi terkait persetujuan ekspor.

"Kementerian Perdagangan mendukung proses hukum yang tengah berjalan saat ini. Kementerian Perdagangan juga siap memberikan informasi yang diperlukan dalam proses penegakkan hukum," tegas mantan Kepala BKPM itu.

Dalam menjalankan fungsinya, Lutfi selalu menekankan jajarannya agar pelayanan perizinan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan transparan. Untuk itu, dirinya mendukung proses hukum jika terbukti terjadi penyalahgunaan wewenang.

"Saya telah menginstruksikan jajaran Kemendag untuk membantu proses penegakan hukum yang tengah berlangsung. Karena tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang menimbulkan kerugian negara dan berdampak terhadap perekonomian nasional, serta merugikan masyarakat," tegas Lutfi.

PT Wilmar Nabati Indonesia ikut angkat suara soal penetapan status tersangka salah satu komisarisnya. Manajemen mendukung proses penegakan hukum yang harus dijalani salah satu petinggi

perusahaan migor kelapa sawit itu.

Tak hanya itu, perseroan juga mengklaim akan mendukung kebijakan pemerintah terkait persetujuan ekspor minyak mentah kelapa sawit (CPO). "Wilmar Group telah mematuhi semua peraturan yang berlaku terkait dengan persetujuan ekspor, kami akan senantiasa kooperatif mendukung kebijakan pemerintah," tulis manajemen.

Pengusaha Protes

Para pengusaha migor protes dengan ditetapkannya 3 pengusaha oleh Kejagung terkait dugaan mafia migor.

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (Gimni), Sahat Sinaga mengatakan, tidak mungkin pengusaha tidak melakukan pemenuhan kebutuhan DMO. Menurutnya, peraturan Kemendag sudah jelas bahwa untuk mendapatkan Persetujuan Ekspor (PE), perusahaan harus memenuhi DMO.

Sebagai bukti pengusaha sudah memenuhi DMO, Sahat merujuk pada pernyataan Menteri Perdagangan yang menyebut sudah ada pemenuhan kebutuhan sebanyak 419 ribu ton minyak goreng dari DMO.

"Kan sudah ada bukti Pak Mendag bilang ada 419 ribu ton yg digelontorkan," kata Sahat, kemarin.

Dia kembali menegaskan, tak mungkin ada pengusaha yang melakukan ekspor tanpa pemenuhan DMO. Untuk mendapatkan PE, menurutnya, setiap perusahaan harus menyeter dokumen secara fisik. ■ MEN